

DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN

Nuhfil hanani AR

Pengertian Diversifikasi Pangan

Konsep diversifikasi pangan bukan suatu hal baru dalam peristilahan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia, oleh karena itu konsep tersebut telah banyak dirumuskan dan diinterpretasikan oleh para pakar sesuai dengan konteks tujuannya. Kasryno, *et al* (1993) memandang diversifikasi pangan sebagai upaya yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pertanian di bidang pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Diversifikasi pangan ini mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi. Dari aspek produksi, diversifikasi berarti perluasan spektrum komoditas pangan, baik dalam hal perluasan pemanfaatan sumber daya, perusahaan komoditas maupun pengembangan produksi komoditas pangan. Oleh karena itu dilihat dari aspek produksi, diversifikasi mencakup pengertian diversifikasi horisontal maupun vertikal. Dari sisi konsumsi, diversifikasi pangan mencakup aspek perilaku yang didasari baik oleh pertimbangan ekonomis seperti pendapatan dan harga komoditas, maupun non ekonomis seperti kebiasaan, selera dan pengetahuan. Pertemuan antara sektor produksi dan konsumsi tidak terlepas dari peranan pemasaran dan distribusi komoditas pangan tersebut. Demikian pula Suhardjo (1998) menyebutkan bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu (1) diversifikasi konsumsi pangan, (2) diversifikasi ketersediaan pangan, dan (3) diversifikasi produksi pangan.

Sementara, Soetrisno (1998) mendefinisikan diversifikasi pangan lebih sempit (dalam konteks konsumsi pangan) yaitu sebagai upaya menganeekaragamkan jenis pangan yang dikonsumsi, mencakup pangan sumber energi dan zat gizi, sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi sesuai dengan kecukupan baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Secara lebih tegas, Pakpahan dan Suhartini (1989) menyatakan dalam konteks Indonesia diversifikasi/keanekaragaman konsumsi pangan sering diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras. Menurut Suhardjo dan Martianto (1992) semakin beragam konsumsi pangan maka kualitas pangan yang dikonsumsi

semakin baik. Oleh karena itu dimensi diversifikasi pangan tidak hanya terbatas pada pada diversifikasi konsumsi makanan pokok saja, tetapi juga makanan pendamping.

Pengukuran Diversifikasi Konsumsi Pangan

Sejalan dengan keragaman konsep/definisi yang digunakan oleh para peneliti/pakar, alat ukur yang digunakan untuk mengukur diversifikasi konsumsi pangan juga sangat beragam. Seperti Jackson (1984) dan Lee (1987) mendefinisikan diversifikasi konsumsi pangan sebagai jumlah jenis makanan yang dikonsumsi, sehingga semakin banyak jenis makanan yang dikonsumsi akan semakin beranekaragam. Cara ini memang sederhana, namun memiliki kelemahan karena belum memperhitungkan kuantitas zat gizi dari setiap jenis pangan, sehingga dalam konteks analisis ketahanan pangan tidak layak dijadikan ukuran (Ariani, 1999). Beberapa metode telah dikembangkan untuk mengukur diversifikasi konsumsi pangan seperti indeks Herfindahl, indeks Simpson dan indeks Entropy. Indeks-indeks tersebut umumnya menghasilkan performa diversifikasi konsumsi yang tidak banyak berbeda (Lee dan Brown, 1989), sehingga banyak peneliti hanya menggunakan salah satu saja yaitu indeks Entropy (Pakpahan dan Suhartini 1990; Simatupang dan Ariani, 1997; Erwidodo *et al.*, 1999). Aspek yang diukur juga beragam seperti pengeluaran pangan, tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. .

Diversifikasi konsumsi pangan juga dapat dinilai tanpa melalui ukuran indeks, tetapi dengan melihat pola pengeluaran keluarga atau arah perkembangan konsumsi pangan. Pemusatan proporsi pengeluaran untuk jenis-jenis komoditas tertentu menunjukkan bahwa konsumsi keluarga tersebut tidak beranekaragam. Dalam skala makro, kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan konsumsi jenis pangannya (Pakpahan, 1990).

Pendekatan yang lebih representatif dan banyak digunakan oleh pakar pertanian dan gizi yaitu dengan pendekatan konsumsi energi penduduk melalui rumusan Pola Pangan Harapan (PPH) yang diperkenalkan oleh FAO-RAPA (1989). PPH didefinisikan sebagai komposisi dari kelompok pangan untuk dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi dan akan memberikan semua zat gizi dalam jumlah yang

mencukupi. Dalam PPH, susunan hidangan makanan dianggap baik karena mengandung 10-12 persen energi dari protein, 20-25 persen energi dari lemak dan sisanya dari karbohidrat. PPH tidak hanya digunakan untuk mengukur tingkat keragaman konsumsi pangan tetapi juga dapat memberikan patokan bagi perencanaan produksi pangan dan pertanian untuk mengetahui kelompok pangan yang harus ditingkatkan produksinya sesuai dengan keadaan ekologi dan ekonomi suatu wilayah (Suhardjo, 1992).

Di Indonesia, konsep tersebut mengalami penyesuaian sebagai respon dari perbedaan situasi konsumsi pangan, budaya dan kondisi sosial ekonomi. Komposisi energi yang dianjurkan untuk penduduk Indonesia sesuai konsep PPH dan dipakai sebagai acuan oleh para pengambil kebijakan di bidang pangan dan gizi seperti pada seperti pada Tabel 1. Semakin tinggi skor PPH berarti semakin beranekaragam, dan nilai skor tertinggi adalah 100, yang berarti diversifikasi konsumsi pangan sangat sempurna.

Tabel 1. Komposisi Energi Menurut Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	PPH FAO	PPH Nasional 2020 (%)	Kisaran (%)	Konsumsi Energi (Kkal)	Konsumsi Bahan Pangan (gram/kap /hari)	Bobot	Skor
1	Padi-padian	40.0	50.0	40-60	1100	300	0,5	25,0
2	Umbi-umbian	5.0	6.0	0-8	132	100	0,5	2,5
3	Pangan Hewani	20.0	12.0	5-20	264	150	2,0	24,0
4	Kacang-kacangan	6.0	5.0	2-10	110	35	2,0	10,0
5	Sayur dan Buah	5.0	6.0	3-8	132	250	5,0	30,0
6	Biji Berminyak	3.0	3.0	0-3	66	10	0,5	1,0
7	Lemak dan Minyak	10.0	10.0	5-15	220	25	0,5	5,0
8	Gula	8.0	5.0	2-8	110	30	0,5	2,5
9	Lainnya	3.0	3.0	0-5	66	-	0,0	0,0
	Jumlah	100	100	100.0	2200	-		100

Sumber: Deptan, (2001)

Kebijakan pemerintah dalam Diversifikasi pangan

Program diversifikasi pangan dapat diusahakan secara simultan di tingkat nasional, regional (daerah) maupun keluarga. Upaya tersebut sebetulnya sudah dirintis

sejak awal dasawarsa 60-an, dimana pemerintah telah menyadari pentingnya dilakukan diversifikasi tersebut (Rahardjo, 1993). Saat itu pemerintah mulai menganjurkan konsumsi bahan-bahan pangan pokok selain beras. Yang menonjol adalah anjuran untuk mengkombinasikan beras dengan jagung, sehingga pernah populer istilah "beras-jagung". Ada dua arti dari istilah itu, yaitu 1) campuran beras dengan jagung, dan 2) penggantian konsumsi beras pada waktu-waktu tertentu dengan jagung. Kebijakan ini ditempuh sebagai reaksi terhadap krisis pangan yang terjadi saat itu.

Kemudian di akhir Pelita I (1974), secara eksplisit pemerintah mencanangkan kebijaksanaan diversifikasi pangan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dan disempurnakan melalui Inpres No.20 tahun 1979. Maksud dari instruksi tersebut adalah untuk lebih menganeekaragaman jenis pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun dalam perjalanannya, tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, dan diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganekaragaman pangan pokok, tidak pada keanakeragaman pangan secara keseluruhan. Sehingga banyak bermunculan berbagai pameran dan demo masak-memasak yang menggunakan bahan baku nonberas seperti dari sagu, jagung, ubikayu atau ubijalar, dengan harapan masyarakat akan beralih pada pangan nonberas. Namun kenyataannya usaha tersebut kurang berhasil untuk mengangkat citra pangan nonberas dan mengubah pola pangan pokok masyarakat.

Setelah sekian lama tidak terdengar gemanya, secara eksplisit baru pada tahun 1991/1992 pemerintah melalui Departemen Pertanian mulai menggarap diversifikasi konsumsi melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG). Berbeda dengan kondisi dasa warsa 60-an yang semata-mata karena terjadi krisis pangan, DPG dilakukan tatkala Indonesia sudah pernah mencapai swasembada beras, dan masyarakat tergantung pada beras. Program DPG bertujuan untuk (1) mendorong meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, dan (2) mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terutama di pedesaan untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragam dan bermutu gizi seimbang. Fokus program DPG lebih diarahkan pada

upaya pemberdayaan kelompok rawan pangan di wilayah miskin dengan memanfaatkan pekarangan pada jangkauan sasaran wilayah program yang terbatas, sehingga upaya yang dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga (Irawan, *et al.* 1999).

Kemudian pada tahun anggaran 1998/1999 dilakukan revitalisasi program DPG untuk memberikan respon yang lebih baik dalam rangka meningkatkan diversifikasi pangan pokok. Upaya ini dilaksanakan dengan perubahan orientasi dari pendekatan sempit (pemanfaatan pekarangan untuk menyediakan aneka ragam kebutuhan pangan) ke arah yang lebih luas yaitu pemanfaatan pekarangan/kebun sekitar rumah guna pengembangan pangan lokal alternatif. Pembinaannya pun tidak terbatas pada aspek budi daya tetapi juga meliputi aspek pengolahan dan penanganan pasca panen agar pangan lokal alternatif ini dapat memenuhi selera masyarakat (Program DPG Pusat, 1998). Tidak dipungkiri, Departemen Kesehatan juga melaksanakan program diversifikasi konsumsi pangan secara tidak langsung melalui program perbaikan gizi yang tujuan utamanya untuk menurunkan angka prevalensi Kurang Energi Protein (KEP), Kurang Vitamin A (KVA), Gangguan Yodium (GAKI), dan anemia (Kodyat *et al.*, 1993).

Kebijakan atau program secara langsung dan tidak langsung yang terkait dengan diversifikasi konsumsi pangan terus digulirkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan dan dilakukan oleh banyak instansi. Sebagai contoh gerakan sadar pangan dan gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, program diversifikasi pangan dan gizi oleh Departemen Pertanian (1993-1998) dan lain-lain. Dari sisi kelembagaan, pada tahun 1989 pada kabinet Pembangunan VI juga dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pangan yang meluncurkan slogan " Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI). Pada tahun 1996 telah lahir Undang-undang no. 7 tentang Pangan, kemudian pada tahun 2002 muncul Kepres No. 68 tentang Ketahanan Pangan. Pada tahun 2001, pada era Kabinet Gotong Royong telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dipimpin langsung oleh Presiden (Suyono, 2002). Kepres ini kemudian diperbaharui melalui Perpres No 83 tahun 2006 tentang Dewan ketahanan pangan, dimana mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program ketahanan pangan termasuk tujuan untuk mengembangkan diversifikasi pangan.

Dalam usaha perwujudan ketahanan pangan pada umumnya dan diversifikasi konsumsi pangan pada khususnya juga dituangkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini salah satunya bertujuan untuk menjamin peningkatan produksi dan konsumsi yang lebih beragam (Krisnamurthi, 2003).

Kinerja Diversifikasi Konsumsi Pangan

Setelah adanya program-program seperti tersebut diatas, pertanyaannya adalah apakah program diversifikasi konsumsi pangan telah berhasil atau bagaimana arah diversifikasi konsumsi pangan kita ?

Konsumsi Sumber Karbohidrat

Tingkat partisipasi konsumsi beras di berbagai wilayah cukup tinggi, yaitu rata-rata hampir mencapai 100 persen, yang berarti hampir semua rumah tangga telah mengkonsumsi beras (Tabel 2). Kecenderungan tersebut tidak hanya terjadi pada rumah tangga perkotaan tetapi juga rumah tangga di pedesaan, walaupun umumnya tingkat partisipasi di desa masih lebih rendah daripada di kota. Bila dilihat antar pulau, maka tingkat partisipasi konsumsi beras tidak jauh berbeda antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, yaitu hampir 100 persen. Partisipasi konsumsi beras yang masih rendah hanya terjadi di pedesaan Maluku dan Papua (yang dikenal wilayah dengan ekologi sagu yaitu sekitar 80 persen).

Tabel 2. Perkembangan Tingkat Partisipasi Konsumsi Beras (%)

Wilayah	1990	1993	1996	1999
Nasional				
Kota	99,9	99,9	99,7	95,3
Desa	95,9	96,0	98,1	97,6
Jawa				
Kota	99,9	99,9	99,8	92,7
Desa	97,6	98,6	99,7	98,2
Sumatera				
Kota	99,9	99,9	99,8	97,7
Desa	100,0	99,9	99,8	99,8
Kalimantan				
Kota	99,7	100,0	99,9	96,8
Desa	100,0	99,9	100,0	99,5
Sulawesi				
Kota	99,7	99,9	99,4	98,5
Desa	98,5	99,5	99,1	98,4
Bali & Nusa Tenggara				
Kota	99,9	99,9	99,8	98,9
Desa	98,4	99,3	99,7	97,8
Maluku & Papua				
Kota	100,0	99,6	99,8	97,7
Desa	80,7	78,6	80,2	91,4

Sumber : Data Susenas, 1990,1993,1996, 1999 (diolah)

Jumlah orang yang mengkonsumsi beras selama tahun 1990 sampai 1996 dapat dikatakan relatif tidak berubah, karena perubahannya masih sangat kecil, dibawah satu persen. Kecenderungan tersebut terjadi di semua pulau, baik di kota maupun di desa. Perbedaanya adalah kalau di kota, tingkat partisipasi konsumsi beras pada kurun waktu tersebut menunjukkan sedikit penurunan, sebaliknya di desa masih menunjukkan pening-katan. Laju tingkat partisipasi konsumsi beras secara agregat di kota tahun 1990-1996 adalah -0,1 persen per tiga tahun, sedangkan untuk desa lajunya 1,1 persen per tiga tahun. Berdasarkan keragaman produk yang ada, seharusnya tingkat partisipasi konsumsi pada rumah tangga perkotaan menurun secara signifikan, dikarenakan di wilayah ini banyak terdapat produk-produk alternatif yang dapat berperan sebagai substitusi beras, baik dalam bentuk mentah maupun olahan, tersedia dalam berbagai kemasan yang praktis, mudah diperoleh dan dihidangkan.

Namun kenyataannya beras masih mendominasi dalam pola konsumsi pangan masyarakat, sehingga perubahannya sangat kecil. Berdasarkan data perkembangan tingkat partisipasi konsumsi beras tersebut dapat diartikan bahwa program diversifikasi konsumsi pangan yang salah satu tujuannya untuk menurunkan tingkat konsumsi beras dapat dibilang masih jalan di tempat.

Tingkat konsumsi beras sekitar 100 kg/kapita/tahun walaupun cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan laju penurunan sebesar 4,2 persen pada periode 1999-2004 (Tabel 3). Demikian pula untuk konsumsi umbi-umbian juga cenderung menurun. Peningkatan laju konsumsi ubijalar sebetulnya lebih disebabkan peningkatan konsumsi pada tahun 2004, yaitu dari 2,7 kg menjadi 3,3 kg/kapita/tahun. Selera masyarakat terhadap pangan berubah seiring dengan semakin maraknya jenis pangan olahan yang siap saji dan praktis, serta dapat diperoleh dengan mudah. Belum lagi adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang jelas berpengaruh pula pada gaya makan. Mungkin orang akan gengsi mengonsumsi jagung dan ubikayu karena komoditas tersebut sudah mempunyai *trade mark* sebagai barang inferior, yang hanya cocok untuk kalangan bawah. Masyarakat mengalihkan fungsi jagung dan ubikayu, tidak lagi sebagai makanan pokok tetapi sebagai makanan selingan atau snack, sehingga jumlah yang dikonsumsi juga sangat terbatas. Dari keragaan data tersebut menunjukkan bahwa pangan lokal seperti jagung dan ubikayu telah ditinggalkan oleh masyarakat, dan pangan global seperti mie menunjukkan kebalikannya. Oleh karena itu apabila harapan diversifikasi konsumsi pangan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal, maka tampaknya salah jalan, arah diversifikasi konsumsi pangan telah melenceng. Sebaliknya dengan maraknya jenis mie dengan berbagai harga, rasa dan jenis telah mampu mempengaruhi konsumen untuk mencoba dan menyenangnya. Konsumsi mie ini terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan rata-rata konsumsi mie instan mencapai 28 bungkus per tahun.

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Pangan Pokok dan Lajunya, 1999-2004

No.	Kelompok Pangan	Komoditas	1999	2002	2004	Laju Th. 1999-2004 (%)
1.	Padi-padian	-Beras (kg)	116,5	115,5	107,0	(4,2)
		-Jagung (kg)	3,4	3,4	3,2	(3,0)
		-Terigu (kg)	6,5	8,5	7,7	7,9
2.	Umbi-umbian	-Ubikayu (kg)	12,7	11,7	12,0	(2,9)
		-Ubijalar (kg)	2,8	2,7	3,3	8,5
		-Tales (kg)	0,4	0,5	0,6	20,0
		-Sagu (kg)	0,5	0,3	0,3	(27,3)
		-Kentang (kg)	1,0	1,8	1,6	20,5
3.	Macam2 Mi	-Basah (kg)	0,2	0,2	0,2	0,0
		-Instant (bks)	18,7	26,1	28,0	19,2
		-Instant (porsi)	0,8	1,3	1,1	14,1

Sumber : Susenas 1999, 2002, 2004. BPS

Perkembangan menarik dalam konsumsi pangan karbohidrat adalah cenderung berubahnya pola konsumsi pangan pokok kelompok masyarakat berpendapatan rendah, terutama di pedesaan, yang mengarah kepada beras dan bahan pangan berbasis tepung terigu, termasuk mie kering, mie basah, mie instan. (Tabel 4). Perubahan ini perlu diwaspadai karena gandum adalah komoditas impor dan belum diproduksi di Indonesia, sehingga arah perubahan pola konsumsi itu dapat menimbulkan ketergantungan pangan pada impor.

Tabel 4. Pola Konsumsi Pangan Pokok Menurut Kelompok Pengeluaran

Golongan pengeluaran (Rp/kap/bl)	2002	2003	2004	2005
Kota+Desa				
< 60.000	B,J,UK	B,J,UK	B	B,T
60.000-79.999	B,J,UK,T	B,J,T,UK	B,T	B,T
80.000-99.999	B,T,UK	B,T,UK	B,T	B,T
100.000-149.999	B,T	B,T	B,T	B,T
150.000-199.999	B,T	B,T	B,T	B,T
200.000-299.999	B,T	B,T	B,T	B,T
300.000-499.999	B,T	B,T	B,T	B,T
>500.000	B,T	B,T	B,T	B,T
Kota				
< 60.000	B,T	B	B,T	B,T
60.000-79.999	B,T	B,T,J	B,T	B,T
80.000-99.999	B,T	B,T	B,T	B,T
100.000-149.999	B,T	B,T	B,T	B,T
150.000-199.999	B,T	B,T	B,T	B,T
200.000-299.999	B,T	B,T	B,T	B,T
300.000-499.999	B,T	B,T	B,T	B,T
>500.000	B,T	B,T	B,T	B,T
Desa				
< 60.000	B,J,UK	B,J,UJ	B,T	B,T
60.000-79.999	B,J,UK	B,J,UK,T	B,T	B,T
80.000-99.999	B,J,T,UK	B,T,UK	B,T	B,T
100.000-149.999	B,T	B,T	B,T	B,T
150.000-199.999	B,T	B,T	B,T	B,T
200.000-299.999	B,T	B,T	B,T	B,T
300.000-499.999	B,T	B,T	B,T	B,T
>500.000	B,T	B,T	B,T	B,T

Sumber ; Susenas 2002, 2003, 2004, 2005 (diolah)

Keterangan: B = Beras, J = Jagung, UK = Ubi Kayu, T = terigu

Konsumsi Sumber Protein dan Lemak

Konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral disajikan dalam Tabel 4 dan 5. Pada saat ini konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia baru mencapai 6,6 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ini lebih rendah dibanding Malaysia dan Filipina yang masing-masing mencapai 48 kg/kap/tahun dan 18 kg/kapita/tahun. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Tabel 4. Konsumsi Pangan Sumber Protein (Kg/kap/th)

Tahun	Daging ruminansia	Daging unggas	Telur	Susu	Ikan	Kacang-kacangan
1996	3,0	3,6	5,1	1,1	16,5	18,0
1999	1,3	1,9	3,5	0,8	14,1	6,8
2002	1,7	3,6	5,6	1,3	16,8	8,9
2005	1,8	4,1	6,1	1,4	18,6	9,3
Laju 1996-1999 (%/th)	-23,3	-47,2	-31,4	-27,3	-14,5	-15,0
Laju 2002-2005 (%/th)	5,9	13,9	8,9	7,7	10,7	4,5

Sumber : Susenas 1996,1999, 2002, 2005 (diolah)

Tabel 5. Konsumsi Pangan Sumber Lemak dan Vitamin/Mineral (Kg/kap/th)

Tahun	Sumber Lemak		Sumber Vit/Mineral	
	Minyak goreng	Buah/biji berminyak	Sayuran	Buah
1996	7,2	4,1	67,5	24,6
1999	7,0	2,7	40,7	18,5
2002	8,3	3,4	47,5	27,2
2005	8,2	3,4	50,8	31,7
Laju 1996-1999 (%/th)	-2,8	-4,1	-39,7	-24,8
Laju 2002-2005 (%/th)	-1,2	0,0	6,9	16,5

Sumber : Susenas 1996, 1999, 2002, 2005 (diolah)

Kondisi di atas menggambarkan bahwa pada masa krisis, terjadi penyesuaian (*adjustment*) strategi pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga. Dengan daya beli yang menurun, masyarakat mengurangi jenis pangan yang harganya mahal dan mensubstitusinya dengan jenis pangan yang relatif murah. Konsumsi beras digantikan dengan jagung dan umbi-umbian. Sedangkan konsumsi protein hewani dikurangi. Dengan demikian, pemenuhan pangan lebih mengutamakan konsep 'kenyang' tanpa memperhatikan kandungan gizinya.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat konsumsi pangan secara mikro diukur dalam bentuk konsumsi energi dan protein. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WKNPG) tahun 2004 menganjurkan konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia masing-masing adalah 2000 kalori/kapita/hari dan 52 gram/kapita/hari.

Secara agregat, konsumsi energi pada tahun 1996 mencapai 2.019 kalori/kapita/hari, sudah lebih tinggi dari yang dianjurkan. Peningkatan konsumsi protein hewani menunjukkan peningkatan baik di wilayah kota maupun di desa. Akan tetapi penambahan konsumsi protein masih bertumpu pada protein yang berasal dari sumber-sumber bahan nabati. Konsumsi protein hewani yang sangat penting untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Pada tahun 2002 proporsi (pangsa) konsumsi protein hewani di kota dan di desa masing-masing sebesar 27,1 persen dan 19,9 persen. Proporsi ini sedikit meningkat menjadi 28,9 persen dan 22,1 persen pada 2005. Meskipun pangsa konsumsi protein hewani di kota lebih tinggi daripada di desa, namun laju kenaikan pangsa di kedua wilayah tersebut relatif sama yaitu 11,9 persen.

Tabel 6. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Menurut Wilayah

No.	Uraian	1996	1999	2002	2003	2004	2005
1.	Energi (Kal/kap/hari)						
	Kota	1.983	1.802	1.945	1.951	1.941	1.923
	Desa	2.040	1.879	2.011	2.018	2.018	2.060
	Kota+Desa	2.019	1.849	1.986	1.991	1.986	1.996
2	Protein(Gram/kap/hari)						
	Kota	55,9	49,3	56,0	56,7	55,9	55,3
	Desa	53,7	48,2	53,2	54,4	53,7	55,3
	Kota+Desa	54,5	48,7	54,4	55,4	54,7	55,23

Sumber: Susenas berbagai tahun (diolah)

Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas atau mutu konsumsi pangan dilihat dengan menggunakan nilai/skor Pola Pangan Harapan (PPH). Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dinilai semakin baik. Kualitas konsumsi pangan yang dianggap sempurna diberikan pada angka kecukupan gizi dengan skor PPH mencapai 100.

Kualitas konsumsi terus meningkat dan pada tahun 2005 mencapai 79,1 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 9,0 persen selama 4 tahun. Laju peningkatan skor PPH yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan konsumsi energi dan protein mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan.

Tabel 7. Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan Berdasarkan PPH

Wilayah	1999	2002	2003	2004	2005
Kota	68,5	80,1	81,9	80,0	81,0
Desa	64,4	72,5	75,1	74,0	77,6
Kota+Desa	66,3	72,6	77,5	76,9	79,1

Sumber : Susenas berbagai tahun (diolah)

Kualitas konsumsi pangan merupakan perwujudan dari kuantitas dan keragaman konsumsi aktual (Tabel 8). Sesuai kondisi ideal (PPH=100) konsumsi padi-padian yang dianjurkan adalah sebesar 1.000 kalori/kapita/hari . Tabel 8 menunjukkan bahwa

Tabel 8. Perbandingan Konsumsi Pangan Anjuran dan Aktual Tahun 1999-2005 (kalori/kapita/hari)

No	Kelompok Pangan	Anjuran	Konsumsi Aktual				
			1999	2002	2003	2004	2005
1	Padi-padian	1000	1240	1253	1252	1248	1241
2	Umbi-umbian	120	69	70	66	77	73
3	Pangan hewani	240	88	117	138	134	139
4	Minyak+Lemak	200	171	205	195	195	199
5	Buah/biji berminyak	60	41	52	56	47	51
6	Kacang2an	100	54	62	62	64	67
7	Gula	100	92	96	101	101	99
8	Sayur+buah	120	70	78	90	87	93
9	Lain-lain	60	26	53	32	33	35
	TOTAL	2000	1851	1986	1992	1986	1997
	Skor PPH	100	66,3	72,6	77,5	76,9	79,1

Sumber: Susenas(diolah)

Kendala diversifikasi konsumsi pangan

Walaupun upaya diversifikasi sudah dirintis sejak dasawarsa 60-an, namun sampai saat ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pola pangan lokal seperti jagung dan ubikayu telah ditinggalkan, berubah ke pola beras dan pola mie. Kualitas pangan juga masih rendah, kurang beragam, masih didominasi pangan sumber karbohidrat terutama dari padi-padian. Ketergantungan akan beras yang masih tinggi dikalangan masyarakat dan meningkatnya tingkat partisipasi dan konsumsi mie secara signifikan menjadikan upaya diversifikasi konsumsi pangan seperti mengalami stagnansi dan salah arah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan diantara faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Pada hakekatnya faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi konsumsi pangan adalah sama dengan dengan faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, ketersediaan pangan dan lain-lainnya, namun setiap orang mempunyai penekanan yang berbeda. Seperti yang telah disampaikan oleh Hardjana (1994) bahwa dalam hal konsumsi pangan, konsumen bertindak tidak hanya atas dasar pertimbangan ekonomi, tetapi juga didorong oleh berbagai penalaran dan perasaan seperti kebutuhan, kepentingan dan kepuasan baik bersifat pribadi maupun sosial.

Soehardjo (1995) menekankan bahwa walaupun selera dan pilihan konsumen didasari pada nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, agama dan pengetahuan, namun tampaknya unsur-unsur prestise menjadi sangat menonjol.

Banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya diversifikasi konsumsi pangan. Ariani (2006) menunjukkan kendala tersebut adalah : 1) beras memang lebih enak dan mudah diolah, 2) adanya konsep makan yang keliru, belum dikatakan makan kalau belum makan nasi, 3) beras sebagai komoditas superior, 4) ketersediaan beras melimpah dan harganya murah, 5) pendapatan rumah tangga, 6) terbatasnya teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras (pangan lokal), 7) kebijakan pangan yang tumpang tindih dan 8) adanya kebijakan impor gandum, jenis *product development* cukup banyak dan promosi yang gencar.